SP - PALU



" PEREMPUAN, LINGKUNGAN, DAN MASA DEPAN YANG ADIL"

Sumber : Solidaritas Perempuan Palu

Salam Solidaritas !!

Buletin Kedaulatan hadir sebagai ruang berbagi informasi, pengalaman, dan suara perempuan akar rumput, aktivis dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang lestari, kehidupan yang layak, dan masa depan yang adil.

Melalui edisi bertema "Perempuan, Lingkungan, dan Masa Depan yang Adil", kami mengajak pembaca untuk melihat peran penting perempuan dalam menjaga ruang hidup sekaligus memperkuat gerakan menuju keadilan sosial dan ekologis.

Pada edisi ini, kami mengangkat headline mengenai Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bagian dari upaya memperjuangkan hak konstitusional perempuan dan mendorong kebijakan yang lebih adil serta berpihak pada kelompok rentan.

APA ITU JUDICAL REVIEW ?

Judical Review atau hak uji materil adalah proses pengujian peraturan perundang- undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan.

Judical review yang dilakukan oleh perempuan bertujuan untuk melawan stuktur hukum yang patriarki, mengubah atau membatalkan pasal-pasal yang diskriminatif terhadap perempuan, memberikan kepastian hukum dan melindungi hak konstitusional perempuan sebagai bagian dari masyarakat.

Melawan Feminisasi Pemiskinan, Meneguhkan Hak Konstitusional Perempuan Akar Rumput

Judicial Review UU Cipta Kerja sebagai Jalan Memperjuangkan Keadilan Gender dan Ruang Hidup

Indonesia sedang menghadapi tantangan serius terhadap kehidupan demokrasi.

lanjutannya Hlmn 2

solidaritas_perempuanpalu soliperpalu sppalu@solidaritasperempuan.org

NEWSLETTER

Melawan Feminisasi Pemiskinan, Meneguhkan Hak Konstitusional Perempuan Akar Rumput

Judicial Review UU Cipta Kerja sebagai Jalan Memperjuangkan Keadilan Gender dan Ruang Hidup

Dalam beberapa tahun terakhir, pembentukan berbagai regulasi menunjukkan kecenderungan hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak warga negara, melainkan semakin diarahkan untuk mempercepat investasi dan mengonsolidasikan kepentingan politik maupun ekonomi. Fenomena ini dikenal sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan hukum untuk memperkuat kekuasaan, bukan membatasinya sebagaimana prinsip negara hukum yang demokratis.

Di saat yang sama, ruang partisipasi publik semakin menyempit. Suara masyarakat, termasuk perempuan akar rumput, semakin sulit memengaruhi kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Berbagai keputusan strategis terkait pengelolaan tanah, hutan, pesisir, laut, dan sumber daya alam lebih banyak ditentukan oleh kepentingan investasi dibandingkan kepentingan masyarakat yang selama ini bergantung pada ruang hidup tersebut. Bagi perempuan, kondisi ini bukan sekadar persoalan politik atau hukum. Dampaknya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tanah dirampas, hutan dibuka untuk industri, atau wilayah pesisir dialih fungsikan, perempuan kehilangan sumber pangan, air bersih, ruang produksi, hingga ruang sosial yang selama ini menopang kehidupan keluarga dan komunitas.

Pada saat yang sama, mereka tetap memikul tanggung jawab kerja-kerja perawatan yang justru semakin berat akibat kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber penghidupan.

Inilah yang kemudian melahirkan **feminisasi pemiskinan** situasi ketika perempuan mengalami kemiskinan secara lebih dalam karena ketimpangan struktural yang terus diproduksi oleh kebijakan negara. Perempuan tidak hanya kehilangan akses terhadap sumber daya alam, tetapi juga memiliki ruang yang sangat terbatas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan masa depan wilayah hidup mereka.

Salah satu regulasi yang menjadi sorotan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Berbagai perubahan dalam regulasi tersebut dinilai memperkuat kemudahan investasi melalui penyederhanaan perizinan, perluasan kewenangan negara dalam penguasaan tanah, hingga melemahnya instrumen perlindungan lingkungan hidup. Akibatnya, masyarakat semakin sulit memberikan masukan yang bermakna terhadap proyek-proyek yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Dampak tersebut dirasakan secara tidak seimbang. Perempuan adat, perempuan petani, perempuan nelayan, dan perempuan di wilayah pedesaan menjadi kelompok yang paling rentan karena sejak awal telah menghadapi ketimpangan akses terhadap tanah, sumber daya alam, informasi, maupun keadilan. Dalam banyak konflik agraria, pembangunan kawasan industri, pertambangan, proyek energi, maupun Proyek Strategis Nasional (PSN), perempuan menjadi pihak yang pertama merasakan hilangnya ruang hidup, meningkatnya beban kerja domestik, hingga terdorong bermigrasi dalam kondisi yang tidak aman.

Padahal, Konstitusi Indonesia menjamin setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum dan kesempatan yang setara. Namun, kesetaraan tidak cukup dimaknai sebagai perlakuan yang sama bagi semua orang.

solidaritas_perempuanpalu soliperpalu sppalu@solidaritasperempuan.org

Yang dibutuhkan adalah kesetaraan substantif, yaitu pengakuan bahwa perempuan menghadapi hambatan struktural yang berbeda sehingga negara wajib mengambil langkah-langkah afirmatif untuk memastikan hak-hak mereka benar-benar terpenuhi.

Kesadaran atas ketimpangan inilah yang mendorong perempuan untuk tidak hanya bertahan menghadapi dampak kebijakan, tetapi juga mulai menggugat kebijakan itu sendiri. Perjuangan perempuan tidak berhenti pada advokasi kasus atau penyelesaian konflik di lapangan, melainkan bergerak menuju perubahan struktur hukum yang melahirkan ketidakadilan tersebut.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui Judicial Review (Hak Uji Materiil) terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Judicial Review merupakan mekanisme konstitusional untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi gerakan perempuan, langkah ini bukan sekadar proses hukum, melainkan strategi politik untuk menantang norma-norma yang memperkuat patriarki, diskriminasi, dan pemiskinan perempuan.

Melalui Judicial Review, perempuan menegaskan bahwa hukum harus kembali pada fungsi utamanya, yaitu melindungi hak konstitusional warga negara, bukan menjadi alat yang melegitimasi penguasaan ruang hidup atas nama investasi. Gugatan ini juga membawa pengalaman nyata perempuan akar rumput ke ruang konstitusi sebagai bukti bahwa kebijakan negara memiliki dampak langsung terhadap kehidupan perempuan.

Bagi Solidaritas Perempuan, perjuangan melalui Judicial Review tidak dapat dipisahkan dari penguatan konsolidasi politik perempuan akar rumput. Pengalaman perempuan dari berbagai komunitas menjadi dasar untuk membangun analisis bersama, memperkuat solidaritas, serta merumuskan strategi kolektif dalam menghadapi kebijakan yang memiskinkan perempuan. Perempuan tidak lagi diposisikan sebagai korban pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kepemimpinan dalam memperjuangkan perubahan.

Perjuangan ini bukan hanya tentang membatalkan pasal-pasal yang diskriminatif, tetapi juga tentang merebut kembali ruang demokrasi, memastikan partisipasi publik yang bermakna, dan menghadirkan kebijakan yang menghormati hak asasi manusia, keadilan gender, serta keadilan ekologis.

Pada akhirnya, melawan feminisasi pemiskinan berarti melawan sistem yang memproduksi ketidakadilan. Meneguhkan hak konstitusional perempuan berarti memastikan bahwa setiap kebijakan negara menghormati pengalaman, pengetahuan, dan kepemimpinan perempuan akar rumput. Sebab perempuan bukan sekadar pihak yang terdampak oleh pembangunan, melainkan aktor utama dalam memperjuangkan masa depan yang adil, demokratis, dan berkelanjutan.

solidaritas_perempuanpalu soliperpalu sppalu@solidaritasperempuan.org

Melalui penyampaian Sikap Politik Perempuan, Solidaritas Perempuan bersama komunitas dan jaringan pendukungnya menegaskan beberapa tuntutan utama, antara lain :

Menghentikan kebijakan dan praktik pembangunan yang berdampak terhadap feminisasi pemiskinan akibat ketimpangan kuasa atas akses dan kontrol sumber daya alam dan sumber agraria, serta memperbesar ketimpangan terhadap perempuan akar rumput, bencana ekologi dan pelanggaran HAM di Indonesia.

Mendorong negara untuk menjalankan kewajiban konstitusional dan kewajiban HAM internasional, termasuk prinsip-prinsip dalam UUD 1945, CEDAW, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan perlindungan terhadap hak warga negara.

Menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional perempuan atas tanah, sumber daya alam, lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, serta partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan.

Memastikan kebijakan negara memenuhi prinsip kesetaraan substantif dan keadilan gender, termasuk melalui tindakan afirmatif bagi kelompok perempuan yang mengalami diskriminasi.

Mengakui pengalaman dan pengetahuan perempuan akar rumput sebagai dasar penyusunan kebijakan publik, bukan sekadar sebagai penerima dampak pembangunan.

"Ketika ruang hidup dirampas atas nama pembangunan, perempuan tidak tinggal diam. Mereka bersatu, menggugat, dan memperjuangkan hak konstitusionalnya demi keadilan bagi generasi hari ini dan masa depan."



solidaritas_perempuanpalu soliperpalu sppalu@solidaritasperempuan.org

HIGHLIGHT PROGRAM

TRAINING FEMINIS: MENGUATKAN PEMAHAMAN IDEOLOGI BAGI ANGGOTA MUDA SP PALU

Serikat Pekerja (SP) Palu menyelenggarakan Training Feminis pada Kamis–Jumat, 11–12 Juni 2026, bertempat di Café Namomi, Jl. Dewi Sartika, Palu. Kegiatan ini ditujukan bagi calon dan anggota muda SP Palu guna meningkatkan pemahaman tentang Ideologi Feminis sebagai landasan perjuangan dalam melawan sistem politik patriarki yang selama ini turut memiskinkan perempuan.
Training difasilitasi oleh **Ruwaida, anggota sekaligus Dewan Pengawas Komunitas (DPK) SP Palu,** yang memandu diskusi dan pendalaman materi selama dua hari pelaksanaan.

KEGIATAN INI DIIKUTI OLEH 22 PESERTA, DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

- 3 orang BEK
- 4 orang staf
- 3 anggota komunitas SP Palu
- 8 peserta muda perempuan
- 2 peserta muda laki-laki
- 1 peserta non-biner



Keberagaman latar belakang peserta ini mencerminkan upaya SP Palu untuk membangun kesadaran kolektif tentang isu-isu gender secara lebih luas, tidak hanya di kalangan anggota inti tetapi juga menjangkau komunitas dan generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan organisasi ke depan.
Melalui training ini, diharapkan peserta memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai ideologi feminis sebagai kerangka analisis sekaligus alat perjuangan, khususnya dalam membaca dan melawan struktur patriarki yang berkontribusi pada kemiskinan perempuan.

TRAINING KEORGANISASIAN: MENGUATKAN PEMAHAMAN SEJARAH DAN NILAI-NILAI PSP

SP Palu menyelenggarakan Training Keorganisasian pada Sabtu, 13 Juni 2026, bertempat di Café Namomi, Jl. Dewi Sartika, Palu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Anggota, Staf, Volunteer, dan Aktivis SP terkait sejarah berdirinya organisasi PSP, nilai-nilai PSP, garis politik, serta kode etik PSP.
Training difasilitasi oleh **Ruwaida, anggota SP Palu yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Komunitas (DPK) SP Palu,** yang memandu jalannya diskusi dan penyampaian materi sepanjang kegiatan.

KEGIATAN INI DIIKUTI OLEH 22 PESERTA, DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

- 3 orang Badan Eksekutif Komunitas
- 5 orang staf
- 3 anggota komunitas SP Palu
- 8 peserta muda perempuan
- 2 peserta muda laki-laki
- 1 peserta non-biner



solidaritas_perempuanpalu soliperpalu sppalu@solidaritasperempuan.org

Keberagaman latar belakang peserta mencerminkan komitmen SP Palu dalam membangun pemahaman keorganisasian secara menyeluruh, menjangkau berbagai elemen mulai dari pengurus, staf, hingga anggota komunitas dan generasi muda.
Melalui training ini, diharapkan seluruh peserta memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai jati diri organisasi, sehingga dapat memperkuat solidaritas dan konsistensi gerakan SP Palu dalam menjalankan garis perjuangannya ke depan.

1 PENGUATAN GERAKAN FEMINIS PEREMPUAN AKAR RUMPUT MELALUI DISKAM (DISKUSI KAMPUNG) DI 12 WILAYAH ORGANISASI

Program DISKAM (Diskusi Kampung) telah dilaksanakan di 12 wilayah organisasi, menjangkau perempuan akar rumput untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap isu keadilan iklim dari perspektif feminis, nilai dan ideologi gerakan, serta keadilan energi.

2 FOCUSS GROUP DISCUSSION (FGD) PEREMPUAN PEMIMPIN DAN PEREMPUAN AKAR RUMPUT MANTAN BURUH MIGRAN DAN KELUARGANYA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN DALAM PENDAMPINGAN DAN PENANGANAN KASUS PEREMPUAN BURUH MIGRAN

Dalam kegigatan FGD yang bertema Peningkatan Kapasitas Paralegal dalam Pendampingan dan Penanganan Kasus Perempuan Buruh Migran (PBM), diikuti 18 perempuan mantan buruh migran dan keluarganya. Sepanjang 2020-2025, tercatat sedikitnya 17 kasus dampingan yang terindikasi TPPO, umumnya berakar dari pemberangkatan unprosedural.



TUJUAN PROGRAM DISKUSI KAMPUNG

- **Memperluas kesadaran kritis mengenai keadilan energi, termasuk dampak PLTU, industri nikel, dan proyek transisi energi yang berpotensi menjadi solusi iklim palsu terhadap kehidupan perempuan.**
- **Memperkuat gerakan politik feminis dalam melawan sistem ekonomi patriarki yang memiskinkan perempuan akibat kebijakan energi, migrasi, dan agraria yang tidak berkeadilan gender.**
- **Menghasilkan basis pengetahuan dan pemahaman lapangan yang mendukung advokasi kebijakan energi yang adil gender.**
- **Memperkuat gerakan feminis perempuan akar rumput di 12 wilayah organisasi**
- **Meningkatkan pemahaman perempuan akar rumput terhadap konsep keadilan iklim berperspektif feminis.**
- **Membangun kesadaran kritis feminis serta pemahaman nilai dan ideologi feminis sebagai landasan perjuangan perempuan dari berbagai identitas (petani, nelayan/pesisir, buruh migran dan keluarganya, perempuan adat).**



solidaritas_perempuanpalu soliperpalu sppalu@solidaritasperempuan.org

Edisi Perdana Agustus 10 2026

RUANG PEREMPUAN BERSUARA

"**Konflik Badan Bank Tanah** bukan sekadar sengketa lahan, tetapi bentuk kekerasan struktural terhadap perempuan. Ketika ruang hidup dirampas, perempuan kehilangan **sumber pangan, penghidupan, pengetahuan lokal, dan rasa aman.** Negara tidak boleh menjadikan perempuan sebagai korban atas nama investasi dan pembangunan. **Hentikan kriminalisasi rakyat, cabut kebijakan yang melegitimasi perampasan ruang hidup, mengorbankan lingkungan dan pulihkan hak-hak masyarakat adat serta perempuan di Tanah Pekurehua**"

WIWIN MATINDAS
Dir. Walhi Sulteng/Anggota SP Palu

"**Tanah bukan sekadar aset,** tetapi ruang hidup, sumber penghidupan, identitas, dan tempat perempuan serta masyarakat membangun keberlangsungan hidup. Ketika Bank Tanah memperluas penguasaan tanah tanpa menjamin **hak, transparansi, dan partisipasi bermakna**, yang dipertaruhkan adalah masa depan keluarga dan komunitas. Kehilangan tanah berarti perempuan dapat kehilangan **sumber pangan, pendapatan, ruang hidup, serta kontrol atas keputusan.** Karena itu, **kebijakan Bank Tanah harus ditinjau kembali**. Pembangunan tidak boleh mengorbankan **hak, penghidupan, dan suara perempuan.**"

ENDANG HERDIANTI
Anggota SP Palu

AGENDA BULAN BERIKUTNYA

1. Workshop pengawasan,
2. Konsolidasi Nasional untuk Judicial Riview
3. Aksi mendukung Judicial Riview solidaritas perempuan



FEMINIST EKONOMY SOLIDARITY

SP Palu terus mendorong kemandirian ekonomi melalui Feminist Ekonomi Solidarity (FES). Hingga saat ini, identifikasi FES telah dilakukan di 13 desa wilayah pengorganisasian.

FES menjadi salah satu upaya untuk membangun kemandirian ekonomi bersama perempuan akar rumput sekaligus memperkuat keberlanjutan organisasi. Karena bagi kami, ekonomi yang berkeadilan juga berarti perempuan memiliki ruang, pilihan, dan kekuatan untuk menentukan masa depannya.

#GugatUUCiptaKerja
#JudicalReviewUUCiptaKerja
#PerempuanLingkunganDanMasaDepanYangAdil

solidaritas_perempuanpalu soliperpalu sppalu@solidaritasperempuan.org